

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah anggota G20 dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan global. Untuk mewujudkannya, Indonesia membentuk *Multi Year Action Plan* (MYAP) yang bertumpu pada pentingnya infrastruktur. Investasi dalam bidang infrastruktur dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, terutama negara *Less Income Countries* (LICs) dan *Middle Income Countries* (MICs) (Idraswari dan Imaniara, 2013).

Pemerintah terus mendukung penyediaan infrastruktur melalui PPP (*Public Private Partnership*) (Bappenas, 2013). Untuk itu, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah-langkah utama untuk memperbaiki kebijakan PPP dan kerangka kerja dalam meningkatkan daya saing program PPP. Pertama, Peraturan Presiden 13/2010, 56/2011, dan 66/2013 telah diterbitkan pemerintah sebagai amandemen kedua dan ketiga dari Peraturan Presiden 67/2005 (Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur). Hal ini menjelaskan ketentuan yang lebih jelas mengenai proposal yang diminta, perjanjian kerjasama dan dukungan pemerintah sebagai jaminan proyek. Perjanjian kerja sama terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan (identifikasi dan seleksi serta prioritas), persiapan proyek (*outline business case* dan penilaian kesiapan), transaksi (*finalization of*

prefeasibility study serta pengadaan), dan kontrak manajemen (perencanaan implementasi kontrak manajemen serta implementasi dan pemantauan kontrak manajemen).

Peraturan Presiden 78/2010 berisi tentang pemberian jaminan pemerintah untuk infrastruktur. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 260/2010 menetapkan prosedur untuk permohonan pemberian jaminan, sedangkan PMK 223/2012 mengatur *Viability Gap Fund*. Kemudian, UU 2/2012 menjelaskan tentang pembebasan lahan untuk proyek pembangunan melayani kepentingan publik dan pelaksanaannya dan Peraturan Presiden 71/2012. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah 27/2012 berisi tentang izin lingkungan yang menggantikan peraturan sebelumnya mengenai analisis dampak lingkungan.

Oleh karena itu, regulasi dalam mendukung PPP menetapkan Permen Bappenas 3/2012 tentang operasional lintas sektor untuk pelaksanaan proyek-proyek dalam bidang infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah melalui Bappenas telah menetapkan 14 proyek prospektif contohnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Manggarai *Railway* dan 13 proyek potensial seperti pengembangan *Maloy International Port* Kalimantan Timur.

Investasi modal merupakan salah satu aspek strategis untuk mengambil keputusan investasi selain penentuan komposisi aktiva. Keputusan pengalokasian modal ke dalam usulan investasi ini harus dievaluasi dan dihubungkan dengan risiko dan hasil yang diharapkan (Hasnawati, 2005). Di dalam perusahaan, dewan komisaris dibentuk untuk mengawasi CEO. Untuk itu, CEO harus menjamin *good governance* yang baik dengan memelihara hubungan investor dan manager perusahaan serta meningkatkan investasi (Kawamura, 2009). Selain itu, kinerja

perusahaan juga diperlukan untuk menilai apakah suatu perusahaan baik atau tidak. Kinerja perusahaan dapat menggambarkan target dan realisasi yang dicapai perusahaan (Hutchinson, 2002).

Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh struktur dewan dan kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan nilai pasar terhadap IOS (*Investment Opportunity Set*). Pendekatan IOS digunakan untuk menganalisis pertumbuhan aset (MBVA) sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *agency theory*. Lippert (1996) mengungkapkan tentang *agency conflict* antara manajemen dan pemegang saham. Pihak manajemen mempunyai pengaruh terhadap *cash flow* perusahaan mendatang sebagai perkembangan yang signifikan terhadap kompensasi insentif. Dalam hal ini, *agency theory* merupakan hal yang tepat untuk menjembatani kepentingan antara pihak manajemen dan investor.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa penelitian. Hutchinson (2002) meneliti sejauh mana pengaruh IOS, struktur dewan komisaris dan kinerja perusahaan pada 229 perusahaan dari 500 perusahaan yang terdaftar di *Australian Stock Exchange* (ASX). Dalam hal ini, peneliti menggunakan proksi variabel dependen (MBVA) serta kinerja perusahaan berdasarkan nilai buku dan nilai pasar yang digunakan Hutchinson (2002).

Sementara itu, Skousen dan Wright (2008) meneliti tentang tingkat kecurangan pada laporan keuangan. Mereka mengemukakan bahwa peluang merupakan alasan untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, persentase dewan komisaris independen dianggap mampu untuk mengurangi kecurangan sehingga laporan

keuangan menjadi lebih valid. Peneliti menggunakan proporsi dewan komisaris karena dewan komisaris lebih independen dalam menghasilkan keputusan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah proporsi struktur dewan komisaris berpengaruh terhadap IOS?
2. Apakah kinerja perusahaan berdasarkan nilai buku berpengaruh terhadap IOS?
3. Apakah kinerja perusahaan berdasarkan nilai pasar berpengaruh terhadap IOS?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh struktur dewan dan kinerja perusahaan terhadap IOS. Struktur dewan diproksikan melalui komisaris independen. Sedangkan kinerja perusahaan diukur berdasarkan nilai buku dan nilai pasar. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 – 2012.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh struktur dewan dan kinerja perusahaan berdasarkan nilai buku dan nilai pasar pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi terhadap IOS.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur dewan dan kinerja perusahaan terhadap IOS sehingga pengguna dapat menilai tentang pilihan investasi yang tepat di masa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak manajemen dan investor tentang pengaruh struktur dewan dan kinerja perusahaan. Karena investasi yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan.